

MEMPERSOALKAN ILMU SOSIAL INDONESIA YANG *AMERICAN-MINDED*

Widya Priyahita

Universitas Gajah Mada Jl. Kaliurang Bulaksumur Yogyakarta 55281
widyapriyahita@hotmail.com

Abstrak

Tulisan ini mempersoalkan corak ilmu sosial di Indonesia yang *American Minded*. yang berupaya menjawab dua pertanyaan terpenting, yakni: mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi. Pada titik ini penting untuk melacak asal-mula pengembangan studi Indonesia. Di sanalah batu fondasi ilmu sosial kita hari ini diletakkan. Selepas dekolonisasi terjadi, kondisi politik global mengalami kontestasi ideologi yang sukses membuat dunia bipolar dalam situasi perang dingin. Amerika sebagai satu diantara dua superpower dunia, melakukan pergeseran kebijakan politik internasional dari *hard power* menuju *soft power*. Dan setali tiga uang; dalam rangka, mengampanyekan *communisto phobia*, membangun imperium bisnis trans-nasional, sekaligus pemasaran *american value*, mereka memainkan politik hegemoni. Kampus dijadikan batu loncatan. Supremasi keilmuan, yang bermuara pada upaya-upaya patronase, selanjutnya dilakukan dengan cara membangun studi kawasan. Salah satunya adalah studi Asia Tenggara.

Kata Kunci : Ilmu Sosial, America Minded, Hegemoni

Abstract

The question paper pattern of social sciences in Indonesia that American Minded. which sought to answer two important questions, namely: why and how things are going. At this point it is important to trace the origin of the development of Indonesian studies. That's where the foundation stones of our social sciences today laid. After decolonization occurred, the condition of the global political contestation of ideology that has successfully made the world in a bipolar Cold War situation. America as a world superpower between the two, do the international politics of the policy shift towards soft power hard power. And Tweedledum and Tweedledee; within the framework, campaigning communisto phobias, build trans-national business empire, as well as marketing american values, they play political hegemony. Used as a springboard campus. Scientific supremacy, which boils down to the efforts of patronage, then performed by means of building area studies. One of them is the study of Southeast Asia.

Key Word: Social Sciences, America Minded, Hegemony

Exordium¹: Mensikapi Ilmu yang “Asing”

Sebagai sebuah sistem pengetahuan, universitas di Indonesia tergolong institusi yang masih muda. Namun demikian, secara cepat universitas berhasil menggantikan dominasi institusi keilmuan berbasis lokal yang lebih dahulu eksis (misalkan

¹ *Exordium* berasal dari Bahasa Latin yakni *exordiri* atau permulaan, dalam bahasa Inggris secara spesifik kata ini diartikan sebagai suatu permulaan dari diskursus (Concise Oxford English Dictionary, 2004, dalam Juru, 2013).

pesantren). Universitas merepresentasikan tidak hanya komitmen negeri ini pada modernitas, tetapi juga diskontinuitas dari tradisi pembelajaran yang ada dalam masyarakat. Pun menghadirkan seperangkat pengetahuan yang berbeda dengan pemahaman orang awam. Tak mengherankan jika universitas di Indonesia seringkali dituduh ‘asing’, ‘terasing’, dan atau bahkan ‘mengasingkan’ masyarakat dari konteks-kultur yang melatari.

Dalam pengembangannya kemudian, universitas sebagai model adopsi yang tidak indigen ini, membutuhkan *role-model* dari negara-negara maju. Terjalinlah relasi patronistik diantara keduanya yang menimbulkan efek ketergantungan. Hal ini masih harus diperparah oleh kenyataan globalisasi, kemajuan teknologi informasi, dan masifnya industrialisasi penerbitan yang dikembangkan negara-negara maju. Akibatnya arus lalu-lintas pengetahuan bergerak menjadi sangat agresif: cepat, mudah, dan murah, namun tanpa menanggalkan coraknya yang cenderung satu arah (*one way distribution*). Kondisi demikian menyebabkan posisi awal hingga kini pengembangan keilmuan di mayoritas negara pascakolonial, seperti Indonesia, cenderung “mencari ke luar” (*outward looking*) daripada secara induktif menggali khasanah yang dimilikinya (indigen). Tak mengehrankan jika banyak ilmuwan lalu gagal dalam menarik *gists* (inti sari/visi kebenaran ilmiah) dari kandungan teori yang dipelajarinya. Dalam bahasa yang lebih tajam, produksi keilmuan tidak mengemuka. Yang nyata adalah aktivitas konsumsi sebatas *taken for granted*.

Tentu ini problematik. Teori-teori yang dikembangkan dalam konteks yang berbeda tersebut pada akhirnya terbukti gagal menjawab kebutuhan masyarakat. Ia bersama klaim universalitas yang dibawanya lalu digugat dan dipertanyakan ulang. Dalam tulisan ini penulis secara khusus akan mempersoalkan corak ilmu sosial di Indonesia yang cenderung *American*

*Minded*². Penulis berupaya menjawab dua pertanyaan terpenting, yakni: mengapa dan bagaimana hal tersebut terjadi? Pada titik ini penting untuk melacak asal-mula pengembangan studi Indonesia. Di sanalah batu fondasi ilmu sosial kita hari ini diletakkan.

Awalnya adalah indologi. Yaitu kajian tentang masyarakat di Kepulauan Hindia-Belanda, yang dicetuskan oleh komunitas keilmuan Eropa modern. Dalam perjalanannya, indologi ini dipengaruhi dan mempengaruhi pembentukan negara kolonial Hindia-Belanda. Alih-alih menjadi cermin realitas sosial, penelitian-penelitian para indolog justru ambil bagian dalam membentuk Indonesia pada masa kolonial dan seterusnya. Dengan begitu, dinamika indologi hanya bisa kita pahami dalam bingkai kekuasaan kolonial.³ Ilmu telah menjadi

² Pada uraiannya kemudian, *American Minded* dimaknai secara longgar bersinggungan pula dengan *Westernism*.

³ Imperialisme dan kolonialisme merupakan sebuah konsep krusial yang digunakan di berbagai disiplin. Kedua pengertian ini berjaln kelindan. Kesepakatan umum mengatakan bahwa kolonialisme sesungguhnya tidak lain merupakan ekspresi imperialism. Ketika mendiskripsikan bentuk imperialism Eropa awal abad Sembilan belas, imperialism cenderung digunakan minimal dalam empat cara berbeda: 1) imperialism sebagai ekspansi ekonomi; 2) imperialism sebagai penundukan *others*; 3) imperialism sebagai sebuah gagasan atau semangat beserta berbagai macam pengejawantahannya; 4) imperialism sebagai satu bidang pengetahuan diskursif. Penggunaan istilah tersebut tidak mesti bertentangan satu sama lain; justru dilihat sebagai analisis yang memfokuskan pada berbagai lapisan imperialism yang berbeda-beda. Awalnya istilah tersebut dipakai sejarawan untuk menjelaskan serangkaian perkembangan arah ekspansi perekonomian Bangsa Eropa. Dalam pembatasan ini, imperialism terkait dengan satu kronologi peristiwa penemuan, penaklukan, eksploitasi, distribusi, dan perampasan. Pemaknaan

rezim kebenaran yang mendisiplinkan masyarakat. Konsepsi atas apa yang baik, benar, bernilai, agung, maupun sebaliknya, dikonstruksi dalam bentuk pengetahuan. Sebagai teks, pengetahuan lantas bukan hanya soal menginformasikan (*to inform*), melukiskan (*to describe*), menjelaskan (*to explain*), dan menyampaikan (*to deliver*), tapi juga sekaligus mencipta (*to invent*). Teks memberi batasan pengertian dan kemudian berhilir pada pertimbangan bagi formasi kekuasaan. Dengan kata lain produksi pengetahuan berjalan paralel dengan produksi atas kuasa. “Suka tidak suka, mau tidak mau”, apa dan bagaimana diskursus atas Indonesia turut dijelaskan sekaligus dicipta oleh teks-teks pengetahuan semacam itu. Dan Barat, Rezim Kolonial, dalam teks dan praktik keseharian, secara dominatif memposisikan Indonesia sebagai yang terpinggir, inferior, warga kelas tiga, tunduk, lemah -tertaktluk. Di samping itu, kehadiran lembaga pendidikan tinggi di era kolonial lebih merupakan wadah mencetak tenaga-tenaga adminstratur *ketimbang* fungsinya yang populer dalam adagium *universitas magistrorum et scholarium*. Dimana aktivitas ilmiah dihidupi.

Selepas dekolonisasi masif terjadi, kondisi politik di level global mengalami

kedua, lebih menitik beratkan pandangan pada penundukan dan penaklukan bangsa-bangsa terjajah. Sedangkan interpretasi *ketiga*, merefleksikan pandangan yang berasal dari Eropa; serta *keempat* dimunculkan oleh para penulis yang memahami imperialisme dan kolonialisme berdasarkan pada keanggotaan serta pengalaman hidup mereka dalam masyarakat terjajah, atau berdasarkan kepentingan mereka dalam memahami imperialisme dari perspektif konteks local. (dalam Smith, 2005: 5)

kontestasi ideologi yang sukses membuat dunia bipolar dalam situasi perang dingin. Amerika sebagai satu di antara dua superpower dunia, melakukan pergeseran kebijakan politik internasional dari *hard power* menuju *soft power*. Dan setali tiga uang; dalam rangka, mengkampanyekan *communisto phobia*, membangun imperium bisnis trans-nasional, sekaligus pemasaran *american value*, mereka memainkan politik hegemoni. Kampus dijadikan batu loncatan. Amerika dengan jeli, mengambil alih peran indolog Belanda yang tersingkir pasca mewabahnya virus anti-kolonial. Fenomena ini tak hanya berlaku di Indonesia, melainkan hampir di seluruh negara poskolonial. Supremasi keilmuan, yang bermuara pada upaya-upaya patronase, selanjutnya dilakukan dengan cara membangun studi kawasan. Salah satunya adalah studi Asia Tenggara. Hal ini akan dielaborasi lebih lanjut pada bagian-bagian berikutnya.

Dengan demikian, membaca periode awal kemerdekaan Indonesia adalah upaya membaca faktor-faktor yang membentuk ilmu sosial kita hari ini. Di sana ada persoalan “objektifikasi Indonesia” yang jernih dijelaskan oleh orientalisme Said (1978) dan poskolonial. Di sana juga ada masalah hegemoni, kuasa ilmu atas ilmu, dimana konsepsi *soft power a la J Nye Jr*, berhasil merejuvenasi ilmu sebagai instrumen kuasa. Melalui kerja-kerja demikian, diharapkan ilmu politik dapat berkembang dinamis karena oleh para peminatnya kemapanan terus dikorek, digugat, disangkal, diafirmasi, dan dibongkar-pasang secara kontinum.

Mengupas (Awal) Hegemoni Amerika: Dari *Hard Power* Menuju *Soft Power*

Hegemoni Amerika berkembang setelah Perang Dunia (PD) II berakhir. Untuk membaca konstelasi politik internasional pasca II dari sudut pandang akademik, peneliti akan menyitir tulisan Shaumil Hadi (2008: 61-75). Secara spesifik yang dimaksud adalah disiplin Hubungan Internasional bagian dari rumpun ilmu politik. Penjelasan ini menarik karena telaah-telaah yang muncul ke permukaan kebanyakan didominasi oleh babaran realitas ekonomi-politik –tidak melihatnya sebagai implikasi dari perdebatan teoritik keilmuan. Meningkatnya pengaruh realisme dalam kajian hubungan internasional boleh jadi secara umum dapat dilihat sebagai suatu respon terhadap kegagalan idealisme-liberal dalam menjelaskan anomali peristiwa di sekitar 1930-an, yang akhirnya memicu PD II. Hadi menilai, para idealis-liberal mengalami salah tafsir atas harapan dan esensi politik bangsa Eropa di tahun itu. Prediksi atas terbangunnya perdamaian, demokratisasi, modernisasi, pasca PD I hanyalah utopia dan merupakan pemahaman yang bias pemenang. Bukan dari perspektif negara-negara kalah (oposan).

Dalam bahasa Carr yang dicuplik Hadi, para idealis-liberal telah memungkir peta politik dan perimbangan kekuasaan di Eropa yang justru tampil dalam keadaan yang *menyolok* antara “Yang Punya (*The Have*)” dan yang “Tidak Punya (*The Have Not*)”. Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat (AS) merupakan pihak “yang

punya”, dalam artian kekuatan besar yang berorientasi pada pelanggaran *status quo*. Sedangkan Jerman, Italia, Jepang, adalah pihak “yang tidak punya”. Jadi, sudah sewajarnya, menurut kaum realis, jika “yang tidak punya”, akan coba memperbaiki keseimbangan internasional melalui penggunaan kekuatan fisik (*hard power*). Oleh karena itulah, politik pembagian kekuasaan pasca Konferensi Perdamaian Paris 1919, ternyata menyisakan duri dalam daging (salah satunya Jerman) yang lama-kelamaan membusuk dan pecah di PD II.

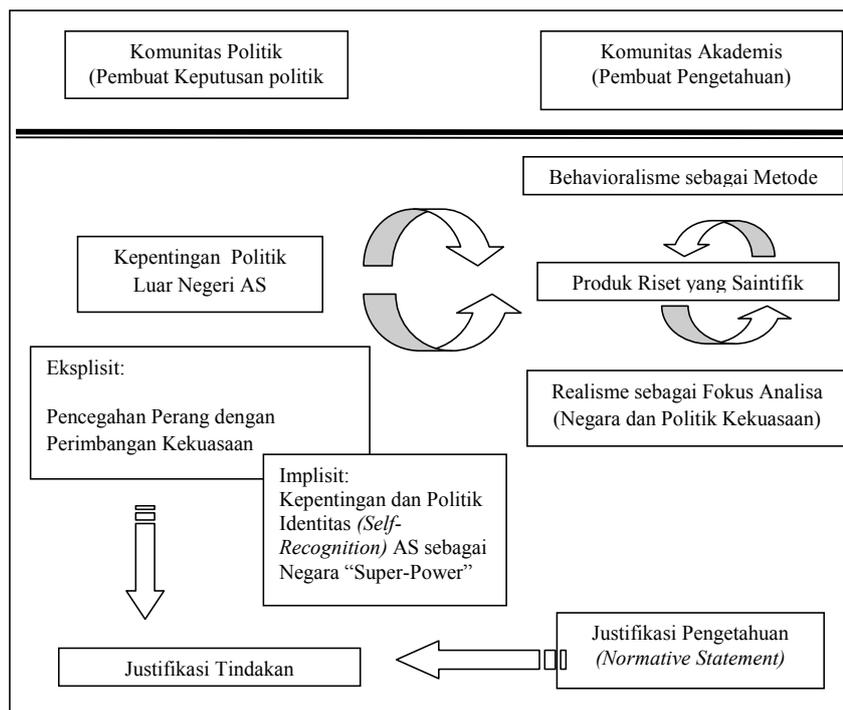
Jelaslah dengan demikian, di mata realis kesalahan terburuk yang menghinggapi para idealis-liberal adalah mereka berangkat dari harapan semu atas indahnya inter-relasi negara di dunia, padahal dalam kenyataan politik internasional, politik condong bercorak “politik kekuasaan” dengan orientasi “kepentingan nasional”. Pada titik inilah pemahaman realis unggul terkait relevansi dan kontekstualitasnya. Sebagai imbas, secara cepat realisme menjadi pendekatan *mainstream* yang mempengaruhi cara pandang para diplomat, pembuat keputusan, serta ilmuwan politik. Berikut adalah elemen dasar yang dikandung realisme: 1) pengedepanan kepentingan nasional (*national interest*); 2) peningkatan kekuatan (*power maximisation*); dan 3) keseimbangan kekuasaan (*balance of power*).

Kaitannya dengan posisi dan peran AS, para ilmuwan politik (realis) jamak menilai, perimbangan kekuasaan mutlak diperlukan; karenanya harus ada suatu

kekuatan tertentu (di luar Eropa) yang dapat mendorong penciptaan stabilitas. AS yang pada awalnya, di kurun waktu antara PD I dan PD II, menerapkan politik isolasionisme oleh karena dasar perbedaan geografis, ideologis, dan kebudayaan dengan negara lainnya di dunia, akhirnya pun dengan segera didorong dalam kancan perang tersebut. Pendeknya, campur tangan AS dalam PD II di Eropa, dan kemudian belahan dunia lainnya (karena faktor eskalasi kekuatan Jepang di Asia Timur Raya), dapat dinilai dalam kerangka ini.⁴

Dimulailah eksplorasi keilmuan oleh para intelektual untuk mencari format baru dalam mewujudkan ambisi AS sebagai super-power baru. Adalah Joseph Nye Jr, akademisi Harvard, tokoh yang dengan getol mempopulerkan konsep *soft power* dalam diskursus hubungan internasional.⁵ *Soft power* hadir sebagai tawaran atas kebijakan politik luar negeri AS untuk mempertahankan dan mengembangkan supremasi kekuasaan global. *Soft power* dianggap relevan dan kontekstual sejalan dengan semangat perdamaian, nir kekerasan,

Tabel.1. Justifikasi Tindakan/Pengetahuan (Teori sebagai Praktik) dalam Politik Luar negeri AS Pasca Perang Dunia ke-2



Sumber : Hadi, 2008: 74

⁴ Selain argumen yang telah dipapar, dorongan AS untuk melibatkan diri dalam perang juga merupakan konsekuensi logis dari peran para intelektual-imigran Eropa yang melakukan eksodus. AS dianggap memberikan iklim intelektual yang nyaman dibandingkan dengan iklim intelektual Eropa yang dilanda krmerican Powerisis, fasisme, dsb.

⁵ Konsep ini dituangkan dalam sejumlah karyanya berikut: buku *Bound to Lead: The Changing Nature of American Power*; buku, *Soft Power: The Means to Success in Worlds Politics*; buku, *The Powers to Lead*; paper, *Notes for a Soft Power Research Agenda*; paper, *Soft Power, Hard Power, and Leadership*; paper, *The Information Revolution and American Soft Power*, dsb.

antikolonial, serta situasi bipolar pasca PD II. Walaupun konsep ini berkembang secara sistematis di tahun-tahun 1980-an, namun pada dasarnya embrio konsep ini telah mengemuka dan tercermin dalam kebijakan-kebijakan politik luar negeri AS lepas tahun 1950, bahkan juga di negara lain pada waktu yang lebih lampau. Secara sederhana *soft power* sendiri dapat didefinisikan *the power of persuasion through ideas, cultures, and policies* (Nye, 2002).

Tabel 2. *Soft dan Hard Power* (Jr Nye, 2006)

Type of Power	Behavior	Sources	Example
Soft	Attract and Co-Opt	Inherent Qualities Communication	Charisma Persuasion
Hard	Threaten and Induce	Threats, Intimidation, Payments, Rewards	Hire, Fire, Demote, Promotions, Compensation

Konsep ini pada perjalanannya berhasil memberi warna dominan atas kebijakan politik internasional berbagai negara di dunia, tak hanya AS, walaupun tanpa meniadakan strategi *hard power* yang penuh kepentingan. Sebagaimana lazim diketahui bahwa industri perang suatu negara adalah satu sumber keuangan terpenting. Dan dalam logika industri, profit dapat mengalir bila proses produksi belangsung lancar karena permintaan yang tinggi atau setidaknya konstan. Pada titik ini, selain sebagai strategi kuasa, perang juga perlu dipahami dari perspektif ekonomi. Dengan demikian, *soft power* hadir tidak berarti menyingkirkan eksistensi *hard-power*, namun justru sebagai pelengkap (komplementer) atau strategi alternatif.

1. *Dekolonisasi dan Perang Dingin: Gonjang-Ganjing Politik Global dan Pengaruhnya bagi Indonesia*

Indonesia berpenduduk 100 juta orang dengan kekayaan sumber daya alam yang mungkin lebih besar daripada negara asia yang lain. Tidak masuk akal untuk mengucilkan sekelompok besar orang yang duduk di atas sumberdaya alam ini, kecuali memang ada alasan yang amat kuat –John F. Kennedy (dalam Archer 2006: 225)

Indonesia adalah sebuah negara yang terlahir pasca perang dunia kedua. Pasca itulah terjadi perang lanjutan di antara dua negara pemenang. Perang ini dikenal dengan nama perang dingin yang diwakili oleh Amerika Serikat dengan ideologi liberalnya dan Uni Soviet dengan ideologi komunisnya. Perang dingin kemudian berlanjut kepada perang memperebutkan pengaruh dan hegemoni di negara-negara lain. Baik Amerika maupun Soviet saling bersaing mencari sekutu di berbagai belahan dunia. Selain karena ideologi Amerika dan Soviet yang saling bertentangan, keduanya juga memiliki kekuatan ekonomi-militer yang tak tertandingi oleh negara mana pun.

Sebagai sebuah negara yang baru merdeka, Indonesia juga menjadi lahan rebutan diantara Amerika dan Soviet. Posisi Indonesia terbilang strategis. *Pertama*, dari sisi demografis, Indonesia adalah satu dari lima negara berpenduduk terbesar di dunia. *Kedua*, melimpahnya sumber daya alam. Dan ketiga, Indonesia merupakan negara pasca-kolonial dengan pengaruh yang besar. Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya Konferensi Asia Afrika

(KAA), Gerakan Non Blok (GNB). dan belakangan organisasi regional negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Melihat kemenangan rezim komunis di China dan tumbuhnya komunis di Korea, Amerika mulai mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya paham komunis diseluruh dunia, termasuk di Indonesia.

2. Setali Tiga Uang: Ganyang Komunis, Investasi Bisnis, Supremasi Militer, dan Pemasaran American Value

Akhir Perang Dunia II menyaksikan Amerika Serikat sebagai satu dari dua negara paling kuat di muka bumi. Kekuatan ekonomi Amerika tidak tertandingi, seperti halnya kekuatan nuklirnya. Amerika Serikat pasca Perang Dingin, sebagai negara pemenang, nampak mencari posisi baru yang tepat untuk mengelola kemenangannya dalam jangka panjang. Bila dicermati, ada benang merah politik luar negeri yang sama yang menjadi ciri pokok sejak usainya Perang Dunia II. Seluruh Presiden Amerika, sejak dari Truman, Eisenhower, Kenedy, Lyndon Johnson, Nixon, Gerard Ford, Carter, Reagan, Bush Sr., Clinton sampai Bush Jr., ingin agar Amerika Serikat menjadi pemimpin dunia, baik dalam politik maupun ekonomi. Baik pada masa Perang Dingin, masa *détente* (peredaan ketegangan) sampai sekarang, intisari dari seluruh politik luar negeri Amerika di bawah para presiden dari Partai Republik maupun dari Partai Demokrat sama saja,

yakni berusaha memegang hegemoni dan supremasi dunia. Hegemoni dan supremasi itu dimaksudkan berlaku di bidang ekonomi, politik, teknologi dan militer. Bila dilihat dari kelahirannya, lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), Bank Dunia, IMF dan WTO sejak semula dirancang untuk melindungi kepentingan ekonomi jangka panjang Amerika dan sekutunya-sekutunya.

Menjelang berakhirnya Perang Dunia II, Amerika dan negara-negara sekutu mengadakan perundingan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Rangkaian Kesepakatan Bretton woods itu pada akhir 1945 melahirkan IBRD yang kemudian menjadi Bank Dunia (*World Bank*) dan IMF (*International Monetary Fund*). Sedangkan WTO (*World Trade Organization*) yang lahir pada 1995 merupakan pengganti GATT (*General Agreement on Tarrif and Trade*) yang dibentuk pada 1947. Pada masa kepemimpinan Clinton (1993-2001) Tata Dunia Baru itu tidak sering dibicarakan. Namun pada masa itulah sebuah *cabal* atau komplotan yang terdiri dari sejumlah intelektual, wartawan, dan politisi Amerika mengembangkan sebuah impian Pax American. Dalam istilah akademik maupun jurnalistik kumpulan tokoh yang mendambakan Pax Americana itu disebut sebagai kaum *neocons* atau kaum neokonservatisme.

Pada intinya kaum *noecons* itu meyakini perlunya supremasi militer yang tidak terkejar oleh Negara manapun

juga. Amerika “ditakdirkan” menjadi penjaga stabilitas internasional. Konsep keseimbangan kekuata/kekuasaan (*balance of power*). Konsep *détente* (peredaan ketegangan), dan konsep keseimbangan terror (*balance of terror*) seperti dipraktikan pada masa Perang Dingin dianggap sudah usang. *Defense Planing Guidance* diatas pada intinya berisi: belanja pertahanan Amerika harus diperbesar; tidak boleh ada pesaing kekuatan militer Amerika di kawasan manapun; serangan preventif dan preemptif boleh dilakukan bila dinilai dapat memenuhi kepentingan global Amerika. Satu usulan yang *over-ambisius* adalah hak Amerika untuk melakukan intervensi ke setiap konflik dimana saja di bola bumi ini, walaupun tidak berkaitan dengan kepentingan Amerika, namun mungkin berkaitang dengan kepentingan sekutu-sekutunya atau demi “memelihara” stabilitas internasional. Tentu DPG tidak menyebutkan bahwa serangan Preemptif/preventif terhadap suatu negara atau suatu wilayah serta intervensi global Amerika itu sesungguhnya untuk melindungi, memperluas dan menjamin kepentingan ekonomi amerika. Termasuk untuk mengontrol minyak dan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara berkembang. (Rais, 2008; 55-62)

3. *Meneliti adalah (Upaya) Menguasai (?): Di Balik Pengembangan Studi Kawasan di Amerika*

Studi politik Indonesia merdeka secara jelas merupakan perkembangan

pasca-Perang Dunia II. Indonesia adalah salah satu negara baru pasca-Perang Dunia II, dan studi politiknya dipengaruhi oleh serangkaian faktor yang secara khas berkaitan dengan masa pasca-Perang Dunia tersebut. Dalam pengertian politik internasional, Indonesia memperoleh kemerdekaan pada masa-masa awal Perang Dingin. Antara tahun 1945-1975 kebanyakan imperium Eropa di Afrika dan Asia telah jatuh. Negara-negara merdeka baru ini pun kemudian menjadi arena kontestasi bipolaritas ideologi antara AS dan Soviet. Dalam konteks ini, Pemerintahan AS melakukan investasi penting dalam program-program studi kawasan untuk mendukung status barunya sebagai hegemon global. Bantuan militer dan non militer digulirkan pemerintah AS yang difokuskan pada Dunia Ketiga. Itulah era di mana studi kawasan mulai tumbuh dan berkembang serta turut andil dalam membentuk konteks dan substansi konsepsi Amerika tentang berbagai kawasan termasuk “Indonesia”.

Perang Dunia II memiliki dampak yang besar bagi kebijakan luar negeri AS. Peristiwa tersebut menggiring sejarah ke periode keterlibatan massif AS dalam urusan internasional, melampaui belahan dunia Barat. Lebih spesifik lagi, AS menyadari bahwa kepentingan sosial, ekonomi, dan politiknya bergantung pada dinamika Dunia Ketiga yang seakan-akan bagian dari dinamika politik dalam negerinya sendiri. Ketidakstabilan di negara-negara Dunia Ketiga dianggap sebagai akar

dari permasalahan internasional yang dapat menghambat keberlangsungan kepentingan Amerika dan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Hal ini berjalan seiring dengan upaya-upaya untuk mempengaruhi Dunia Ketiga, sebagaimana diungkapkan Girling (1980: 15, dalam Samuel, 2010: 100).

“Letupan-letupan revolusi dan ketakutan terhadapnya telah menguasai kebijakan Amerika terhadap Dunia Ketiga selama lebih dari seperempat abad. Baik fakta maupun ketakutan bercampur aduk dalam keyakinan bahwa pemberontakan ‘pribumi’ dan aksi massa di kota—kota, maupun revolusi yang jelas-jelas dipimpin oleh komunis, dapat dipicu pertama-tama justru oleh ‘komunisme internasional’—dibanding oleh Moskow atau Peking—melalui suatu gelombang revolusi terhadap suatu Negara Dunia Ketiga lainnya. Hal ini dilihat sebagai ancaman ‘universal’ terhadap keamanan Amerika sendiri; karenanya hal ini membutuhkan respons yang serius”

Perguliran dari Indologi menjadi kajian Indonesia perlu dipahami dalam bingkai dinamika kebijakan internasional AS ini. Semenjak akhir Perang Dunia II, perguruan-perguruan tinggi Amerika mulai mengambil peran secara massif dalam pembangunan masyarakat-masyarakat diluar AS (khususnya Negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang baru merdeka). Pemerintah AS menyediakan dukungan politik dan finansial.

Pemerintahan Presiden Harry Truman, dengan sederet program bantuan luar negrinya, merupakan penanda datangnya era keterlibatan AS di seluruh belahan dunia. Menurut Beers, pemerintahan Truman

mendorong perguruan-perguruan tinggi Amerika untuk berkembang. Perguruan tinggi yang awalnya hanya mengadakan program pertukaran internasional berskala kecil didorong untuk menjadi pelaku proyek-proyek mancanegara berskala besar. Skema kerja sama ini juga digunakan oleh perguruan tinggi Amerika dan pemerintah AS untuk memperoleh data-data tangan pertama tentang negar-negara di luar AS. Dalam hal ini, terlihat keserupaan di antara kajian wilayah di AS dengan studi Oriental Eropa. Pada kedua hal tersebut Negara memiliki andil yang besar. Signifikansi pusat Indologi di Belanda merosot setelah lengsernya kekuasaan kolonial Belanda, sementara *Cornell Indonesian Project* dan pusat studi sejenis mendapatkan momentum seiring perubahan focus politik di AS ke Indochina (yakni, dana riset direlokasi untuk mempelajari kehidupan politik di Indochina) dan Asia Tenggara.

Pendirian pusat-pusat kajian wilayah merupakan fenomena yang berkembang diantara perguruan tinggi Amerika pada 1950an. Sedari awal, kalangan militer AS memegang peranan kunci.⁶ Menurut pihak

⁶ Perlu ditekankan bahwa kolaborasi di antara ilmuwan sosial Amerika dengan angkatan bersenjata AS bermula pada saat Perang Dunia II: terjadi “nasionalisasi” ilmu sosial. Di kemudian hari muncul perlawanan-perlawanan terhadap kolaborasi semacam ini. Pada mulanya, banyak ilmuwan Amerika yang tidak menolak kerja sama di antarany dunia keilmuan dengan militer. Hal ini berlanjut dan dibangun di atas pola kolaborasi yang dirampungkan pada masa perang. selama Perang Dunia II, banyak sosiolog, antropolog, pakar politik, dan ilmuwan social Amerika lainnya direkrut untuk bekerja sebagai peneliti dalam Departemen Perang. Selain itu, setelah kembali ke dunia akademik selepas perang, kebanyakan dari para peneliti ini memegang posisi kunci dan memainkan

militer AS, pendirian pusat kajian wilayah dapat mengakomodasi kepentingannya. Maka melalui *Specialized Training Programs*, militer AS mempromosikan pendirian program-program kajian wilayah di perguruan tinggi Amerika untuk menghasilkan pakar dalam bahasa kebudayaan beragam masyarakat di dunia. Sebagaimana yang diamati Lambert (1989), militer mendanai proyek kajian studi wilayah dan membantu pendirian sekitar 600 kajian wilayah dan pusat bahasa di perguruan tinggi Amerika. Banyak di antara para spesialis jebolan program ini lantas direkrut menjadi tenaga intelijen oleh *Office of Strategic service* (yang kemudian dikenal dengan nama *Central Intelligence Agency* [CIA]). Pendirian pusat kajian Indonesia juga tak lepas dari kerangka politik ini. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945, pemerintah AS nyaris tak memiliki pengalaman atau pengetahuantentang Indonesia, ataupun tentang Negara-negara selatan dan Asian Tenggara lainnya. Pengetahuan AS berfokus

peranan inti dalam dunia akademik. Harvard Social Relations Department, contohnya, didirikan oleh Clyde Kluckhohn, Henry Murray, Samuel Stouffer, dan lain-lain. Ketiganya bekerja untuk militer selama Perang Dunia II. Fenomena yang sama juga terlihat dari keterlibatan Presiden American Sociological Association dalam penelitian militer: pada 1967, tujuh dari antara yang pernah menjabat presiden ASA terlibat aktif dalam penelitian militer. Akan tetapi, sejak 1960-an gagasan tentang bekerja sama dengan militer dikritik secara serius. Saat itu bertumbuh kecenderungan untuk menentang kolaborasi seperti itu. Banyak ilmuwan yang menjadi kritis terhadap kebijakan luar negeri AS. Hal ini sebagian menyebabkan sejumlah pakar wilayah menjaga jarak dari Departemen Pertahanan. (dalam Samuel, 2010: 103-104)

pada Jepang dan gerakan Pan-Asia yang dipimpinnya, serta dekolonisasi di Asia. Namun demikian situasi segera berubah. AS tak hanya berupaya untuk memahami belahan dunia Timur, Selatan, dan Asia Tenggara, tetapi belahan-belahan dunia inipun segera bergulir menjadi medan panas berlangsungnya perang dingin. Cina, Korea, India, dan Negara-negara besar Asia Tenggara mendapatkan perhatian yang luar biasa dalam kebijakan luar negeri AS. Ketika Truman meninggalkan kursi kepresidenan pada tahun 1953, kebijakan luar negeri telah mendapatkan prioritas yang penting dalam dunia politik AS. Pola kebijakan isolasionisme telah mati, dan dimata AS medan internasional memiliki arti yang sama dengan medan domestik. Dunia telah terangkai menjadi sebuah oposisi bipolar diantara dunia barat “yang bebas” *vis-à-vis* komunisme. Asia-secara khusus Asia Tenggara—pun menjadi fokus utama dalam kepentingan Amerika.

Southwood dan Flanagan menegaskan bahwa Indonesia telah menjadi bagian sentral dari pemikiran strategis Amerika tentang Asia Tenggara sejak berakhirnya Perang Dunia II dan bahwa Indonesia menjadi tonggak dominasi Amerika atas ‘wilayah Asia-Pasifik’. Bahkan Presiden Richard Nixon sendiri mengatakan bahwa Indonesia adalah mutiara dalam tahta Asia Tenggara. Sebagaimana pengamatan Mark Berger dalam konteks kajian Amerika Latin, kelompok radikal hanya memiliki pilihan untuk membangkitkan wacana ‘yang bertentangan’ dengan mengadopsi

bahasa dan kategori wacana yang ingin mereka bongkar. Berada dalam 'jaringan berbagai lembaga, organisasi, dan struktur yang luas dan kompleks', wacana-wacana yang bersifat oposisional pun bisa menjadi 'pelengkap untuk menjaga hegemoni Amerika'.

Di antara tema-tema yang paling umum diambil dalam penelitian Indonesianis Amerika adalah demokratisasi, "Indonesia sebagai entitas politik", nasionalisme, pluralisme, pembangunan kebangsaan, dan komunisme. Contoh yang menarik dan tepat untuk menggambarkan keadaan ini adalah penelitian Hindley, *The Communist Party of Indonesia*. Penelitian ini diselesaikan ketika Donald Hindley berada di Brandeis University (Massachusetts) pada 1963. Buku ini menganalisa dinamika PKI di Indonesia pada periode 1951-1963 berdasarkan data-data yang rinci tentang hubungan diantara PKI dengan pemerintah Indonesia. Meskipun penelitian Hindley terletak pada kasus Indonesia, analisisnya menyerupai kecurigaan Amerika yang berkembang pada saat itu tentang ekspansi komunisme. Rusia dan Cina dipandang tengah gencar-gencarnya memperluas pengaruh mereka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di sini Hindley juga mempercayai bahwa partai-partai komunis cenderung bermunculan di negara tertinggal ketimbang pada masyarakat dengan system kapitalis yang lebih mapan.

Dalam konteks keterlibatan Amerika dalam persoalan Indonesia, para Indonesianis sering kali sangat

kritis terhadap motif dan kebijakan pemerintah Amerika. Namun mereka jarang mengeksplorasi hubungan antara hegemoni global Amerika dengan produksi pengetahuan akademik yang menopang hegemoni itu. Sementara eksperimentasi dengan politik demokrasi liberal terus dilakukan di Asia Tenggara selama 1950an, AS dan para ilmuwan politik didikan AS terus setia dengan wacana dan kebijakan pembangunan ekonomi, kemajuan, dan demokrasi. Studi politik Indonesia lebih merupakan kompleksitas relasi diskursif dan institusional daripada serangkaian teks yang otonom. Studi tersebut memerlukan sebuah rezim kebenaran di mana bobot otoritasnya juga ditentukan oleh berbagai aturan, regulasi, dan konvensi ilmu-ilmu sosial, selain oleh pengalaman personal akademisi bersangkutan. (dalam Samuel, 2010: 100-106; Philpott, 2003: 75-82).

4. Patronase - Dari dan Menuju Kampus: Cara Amerika Membangun Supremasi Keilmuan

Kolonialisme, rasisme, dan imperialisme kultural tidak hanya berlangsung dalam masyarakat, namun berlangsung juga di dalam gerbang universitas – Cheryl Smith dalam Smith, 2005: 34

Proklamasi kemerdekaan 1945 menandai era baru dalam pembangunan Indonesia. Posisi-posisi dalam pemerintahan yang ditinggalkan lowong oleh Belanda diisi oleh para politisi dan angkatan bersenjata Republik Indonesia. Tahun 1949 Indonesia kemudian memperoleh

pengakuan internasional dari AS, Australia, dan lainnya terutama negara-negara Asia-Afrika. Ketika pemerintah melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, peran Belanda dalam perekonomian pun secara perlahan meredup. Begitu juga istilah “Indolog” Belanda berangsur-angsur kehilangan popularitasnya digantikan oleh “Indonesianis” AS. Hal ini secara khusus dikarenakan keterlibatan Amerika dalam perkembangan Indonesia. Para ilmuwan Amerika mengambil andil dalam membentuk konsepsi tentang Indonesia. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cornell University, dan Yale University memfasilitasi keterlibatan para ilmuwan Amerika dalam skala yang besar. Tiga universitas ini mendirikan pusat studi Indonesia pertama di antara perguruan-perguruan tinggi Amerika. Di MIT, penelitian tentang Indonesia dilakukan di *Massachusetts Institute of Technology Centre for International Studies*, yang di dalamnya terdapat *Indonesia Project* dan *Tim Lapangan Indonesia*, dengan bantuan finansial dari Ford Foundation. Benjamin Higgins mengepalai *Indonesian Project* dan Rufus Hendon menjadi ketua *Tim Lapangan Indonesia*. Namun kedua kelompok ini memiliki pikiran yang sama tentang perkembangan ekonomi dan politik Indonesia.

Pusat Studi Indonesia di Yale juga muncul dari konteks yang sama. Namun apa yang menjadi fokus mereka pada umumnya adalah sejarah Indonesia. Pusat studi lainnya adalah *Cornell Modern Indonesian Project*

yang didirikan oleh George McT Kahin di 1950an. Dekade ini merupakan era ketika AS menggantikan peran Eropa sebagai pusat-pusat kajian wilayah.⁷ Pendirian *Cornell Indonesian Modern Project* amat terdorong oleh upaya untuk memahami negara-negara baru merdeka di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Dan persis dengan kajian wilayah, program pusat, atau lembaga lainnya yang didirikan di AS pada saat itu, Cornell Project didanai oleh pemerintah AS dan badan-badan lainnya yang memiliki kepentingan membendung pengaruh komunisme dalam kerangka bipolaritas perang dingin.

Pusat-pusat studi Indonesia dalam perjalanannya juga menghasilkan Indonesianis non-Amerika dan membantu merampungkan pusat-pusat serupa di luar negeri, seperti Australia. Pusat studi Indonesia di Monash didirikan oleh John Legge dengan nama *Center for Southeast Asian Studies* pada tahun 1964. Hingga awal 1970an pusat studi ini menjaga hubungan yang dekat dengan *Cornell Indonesian Project* sehingga pusat studi di Cornell tersebut kerap dianggap sebagai cetak biru pusat studi di Australia ini. Pusat-pusat studi Indonesia di Monash dan perguruan tinggi di Australis lainnya telah memainkan peranan yang penting dalam menggali konsepsi tentang Indonesia. Hal ini terkait dengan fakta Australia dan Indonesia berada di wilayah geografis yang sama,

⁷ Karena problem politik yang terjadi di daratan Eropa, pada era ini universitas-universitas di AS memperoleh keuntungan atas eksodus yang dilakukan oleh tenaga akademik Eropa ke pusat-pusat studi mereka.

sementara karakter ekonomi, politik dan kultural mereka tampak begitu berbeda.

Hal lain yang penting dalam pendirian pusat studi Indonesia di AS adalah kebijakan mendidik sejumlah sosok berpotensi di Indonesia menjadi ilmuwan sosial, seperti Selo Sumardjan, Mely G Tan, dan Miriam Budiardjo. Para ilmuwan Indonesia ini kemudian membangun jaringan dengan para Indonesianis asing. Sementara sejumlah peneliti Amerika bertumbuh selama perang dunia ke II hingga pertengahan 1970an, jumlah Indolog Belanda merosot. Peran dari Hurgronje, Boeke, Beruger, dan para indolog lainnya digantikan oleh para peneliti Amerika seperti George McT Kahin, Donald E Willmott, Clifford Gertz, Hidred Geertz, Robert Jay, dan AC Dewey. Para Indonesianis Australia juga bergabung dengan Amerika. Dan keseluruhan proses ini tidak pernah terlepas dari tiga pusat studi Indonesia di Amerika yang telah dipaparkan. Para peneliti Belanda sendiri tak dapat menikmati apa yang dinikmati peneliti AS pada 1950-1960an. Hal ini utamanya dikarenakan sikap pemerintah Republik yang tidak bersahabat terhadap Belanda dan kemerosotan minat yang luar biasa terhadap Indonesia di Belanda.

Konteks lain yang mendorong masifnya pendanaan proyek "memahami Indonesia" yang dilakukan AS tersebut juga dipengaruhi konflik di Korea, Malaysia, dan Vietnam yang semakin meresahkan. Karenanya, terdapat dukungan yang kuat bagi ilmuwan AS yang bersedia berpartisipasi

langsung dalam proses perkembangan ekonomi di Indonesia. Beberapa dari mereka bahkan terlibat langsung dalam perumusan kebijakan pemerintah Indonesia. Benjamin Higgins, misalnya, ditugaskan untuk bekerja di Biro Perencanaan Nasional untuk Pembangunan Ekonomi. Contoh lainnya adalah pendirian *Kentucky Contract Team (the Kenteam)* yang meneliti Indonesia dari akhir 1957 hingga berakhir di awal 1966. Tugasnya adalah mengembangkan Institute Pertanian Bogor (IPB) dalam aspek teknis maupun sosial tentang penerapan ilmu pertanian, seperti agronomi, kehutanan, dan sosiologi pedesaan. Keterlibatan ini hanyalah sebagian kecil dari keterlibatan dunia keilmuan Amerika pada 1950an dalam berbagai dimensi kehidupan sebuah negara baru merdeka. (dalam Samuel, 2010: 81-88)

Ada Uang di Balik Ilmu: Mengurai Peran Korporasi dalam "(Modern) Indonesian Project"

Dalam dunia ilmu sosial, istilah korporatokrasi belum digunakan secara meluas dan relative baru. Adalah John Perkins, dalam bukunya *Confessions of an Economic Hit Man* (2004), yang menggunakannya untuk menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, bank, dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka.

“Istilah itu begitu saja datang bertengger di pikiran saya: korporatokrasi. Saya tidak yakin apakah saya sudah pernah mendengarnya atau saya menciptakannya, tetapi istilah itu nampak sangat cocok untuk menggambarkan elite baru yang telah berketetapan untuk mencoba menguasai planet bumi”. (*A word came to my mind: corporatocracy. I was not sure whether I had heard it before or had just invented it, but it seemed to describe perfectly the new elite who had made up their minds to attempt to rule the planet*).

Di Indonesia sendiri, istilah tersebut mulai dikenal empat tahun kemudian setelah Amien Rais mengulasnya dalam buku, *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!*. Sesungguhnya istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar memang dalam kenyataannya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan mereka. Kalau pemerintahan yang dikuasai oleh kaum aristocrat (bangsawan) disebut sebagai aristokrasi, oleh plutokrat (orang kaya) disebut sebagai plutokrasi, oleh kleptokrat (maling, preman) disebut sebagai kleptokrasi, maka sebuah pemerintahan yang dikendalikan oleh korporatokrat (pemilik korporasi besar) boleh juga dinamakan sebagai korporatokrasi.

Dalam bukunya tersebut, Rais (2008: 81-85) coba mendeskripsikan korporatokrasi lebih lanjut. Ia dianggap sebagai system atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengontrol ekonomi dan politik global yang memiliki (setidaknya) tujuh unsur, yaitu: 1) korporasi-korporasi besar; 2) kekuatan politik pemerintahan

pemerintahan tertentu, terutama Amerika dan kaki-tangannya; 3) perbankan internasional; 4) kekuatan militer; 5) media massa; 6) kaum intelektual yang dikooptasi; dan terakhir, 7) yang tidak kalah penting elite nasional negara-negara berkembang yang bermental inlander, komprador atau pelayan. Korporasi yang dimaksudkan di sini adalah korporasi “besar”, karena korporasi-korporasi kecil pada umumnya tidak memiliki ambisi untuk menguras kekayaan bumi dan membangun sistem atau mesin kekuasaan untuk menciptakan imperium global. David Korten (*Ibid.*) melukiskan betapa menakutkan langkah-langkah korporasi besar itu untuk melakukan kolonialisasi planet bumi:

Ketika korporasi-korporasi (besar) memperoleh kekuasaan kelembagaan yang bersifat otonom dan makin terasingkan dari masyarakat dan tempatnya, kepentingan korporasi dan kepentingan kemanusiaan semakin menganga berbeda. Kini kita merasa seolah-olah diserbu oleh makhluk-makhluk aneh yang bermaksud menduduki planet bumi kita, mereduksi kita menjadi sekedar budak sahaya, dan mengucilkan kita sebanyak-banyaknya.

Pada umumnya korporasi besar dihindangi penyakit *pathology of profit* atau penyakit mencari untung secara membabi buta. Tujuan mutlak korporasi adalah mencari keuntungan maksimal dengan biaya minimal dan waktu minimal. Semua cara untuk mendapatkan keuntungan dapat ditempuh. Yang premier adalah keuntungan, yang lainnya sekunder. Proses rekrutmen, pelatihan, administrasi, advertensi, akomodasi, produksi, penggudangan,

profit-sharing dan lain-lain dibenarkan lewat segala cara, asal tujuan mutlak dapat dicapai (*Ibid.*). Tepat pada titik inilah, kita bisa coba memahami kepentingan di balik “kucuran dana” dalam jumlah besar oleh sejumlah korporasi besar dalam proyek-proyek pendidikan di Indonesia; entah itu upaya membangun Modern Indonesia Project, Pemberaian beasiswa, pengembangan penelitian, dan sebagainya. Jalinan kepentingan antara negara maju dan korporasi berhasil menjadikan negara-negara berkembang sebagai target penguasaannya di bidang ekonomi-politik.

Mempersoalkan Proses Rancang Bangun Pelembagaan Pengembangan Ilmu Politik di Indonesia

Salah satu karangan penting terkait hal ini ditulis oleh David Ransome, *The Berkeley Mafia* (1970), yang diulas oleh Bruce Glassburner, *Politik Ekonomi dan Pemerintahan Orde Baru*, dalam Arndt [(ed), 1987]. Menurut Ransome dikutip Glassburner, Kepala Perwakilan Ford Foundation di Jakarta tahun 1950-an, Michael Harris, “dituduh” telah berusaha mengarahkan pelajaran ekonomi di universitas-universitas Indonesia kepada pemikiran Barat ortodoks, sebagai suatu usaha mencegah “kekiri-kirian”, khususnya “Soekarnoisme”. Alat yang dipakai berupa bantuan (*grant*) Ford Foundation (Rockerfeller Foundation, dan Fulbright) dalam jumlah besar kepada Indonesia, yang diatur universitas-universitas Amerika, untuk studi lanjut di Amerika maupun membiayai tim Amerika yang menjadi

penasihat dalam kurikulum dan yang berhubungan dengan itu, atau mengajar di Indonesia.

Tujuan utama Ransome dengan karangannya adalah menyalahkan keterlibatan University of California (Berkeley) dan Ford Foundation dalam upaya pembersihan berdarah dan penghapusan Partai Komunis Indonesia (PKI), serta yang terpenting adalah asosiasi intelektual ini dimaksudkan untuk penerapan ideologi ekonomi komprador (*comprador economy ideology*) dan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan Amerika. Di luar Berkeley, catat Philpott dalam tulisan *Uang dan Kekuasaan: Yayasan-Yayasan swasta yang Didanai oleh Kapitalis* (2005), ada juga keterlibatan kuat dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Cornell University. Bahkan di Cornell, Ford Foundation, juga mendanai pendirian *Modern Indonesia Project*, suatu program studi Indonesia yang paling berpengaruh selama empat puluh tahun terakhir. Dalam perjalanannya, jumlah donor semakin besar dan semakin beragam latar geografis, bidang, kepentingan, ideologi, dan karakteristik lainnya (menyebut sejumlah contoh: dari Eropa Barat termasuk Skandinavia, Eropa Timur, Asia Timur, Timur Tengah, dan Australia).

Dilema “Politik Pemberian Beasiswa”

If you want to invest in the short term, grow rice. If you want to invest in medium term, plant a tree. If you want to invest in the long run, educate people
–Chinese proverb [dalam Nugroho (a)]

Menyangkut penyingkapan kepentingan di balik pemberian beasiswa, peneliti tertarik untuk mencuplik tulisan Agung Nugroho (a) bertajuk *Politik Beasiswa Australia*. Dalam tulisannya tersebut, Nugroho menyampaikan setidaknya ada tiga faktor yang patut diduga menjadi pendorong sebuah negara memberikan bantuan pendidikan dalam bentuk beasiswa. *Pertama* yakni politik etis. Tidak hanya Van de Venter dan Abraham van Kuyper yang seorang pendeta di parlemen Belanda, banyak tokoh di negara-negara “imperialis” lain pun berpendapat bahwa rakyat di negara jajahan sudah sewajarnya mendapatkan bantuan kemanusiaan sebagai bentuk politik etis atas jajahan yang dideritanya bertahun-tahun.⁸

Kedua, familiarisasi. Salah satu *treatment* menghadapi sebuah negara yang dianggap berpotensi memberikan ancaman adalah justru dengan cara membangun ikatan psikologis melalui jalinan persahabatan dengannya. Nugroho mengurai, cara menimbulkan ikatan ini bermacam-macam. Mulai dari yang natural⁹

⁸ Munculnya Bartolome de las Casas yang meminta pemerintah Spanyol menghentikan perbudakan terhadap orang Indian di Amerika Latin adalah contoh lain bahwa dalam masyarakat kolonialis pun selalu ada semangat untuk merekonstruksi apresiasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, balas budi, dan minta maaf.

⁹ Melalui interaksi yang terjalin antara penerima beasiswa dengan warga di negara *host*. Bukan tidak mungkin di antara mereka kemudian terajut persahabatan bahkan untaian kasih. Di luar itu, pengalaman tinggal di negara *host*, juga akan menimbulkan kedekatan emosional bahkan loyalitas ganda. Merupakan hal yang jamak terjadi, seorang penerima beasiswa menganggap *host* sebagai tanah air kedua.

sampai yang sistematis. Penerima beasiswa diposisikan sebagai agen kultural yang akan menjembatani *gab* kedua negara. Untuk memuluskan ide tersebut dilakukanlah penganugerahan prestise. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah negara-negara pemberi beasiswa mengganjar scholar dengan universitas-universitas terbaik di negaranya. Di Jepang, Nugroho menggambarkan, masuk Tokyo Daigaku (Todai) University adalah jaminan awal masuk menjadi anggota cabinet—karenanya tak ayal jika cukup banyak anak muda Jepang *harakiri* karena gagal masuk ke sana.

Ketiga, kontrapestrasi strategis. Pemerintah negara *host* berkepentingan membangun jaringan. Dari sekian ratus *scholar* yang dibiayai untuk meraih gelar master atau doktor di negaranya, pastinya ada sekian orang yang akan menduduki posisi dan jabatan strategis. Karenanya kemudian, seleksi, kandidasi, atau kualifikasi sangat diperlukan dalam proses rekrutmen. Tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan dapat menjalani program pendidikan dengan hasil yang memuaskan; namun utamanya adalah sebagai mekanisme penyaringan actor-aktor potensial. Terkait hal ini kita dapat berkaca kepada AS yang hingga kini masih getol memberikan beasiswa USaid dalam skema Fullbright atau Ford Foundation. ‘Mafia Berkeley’ yang secara legendaries kita kenal terdiri dari J.B. Sumarlin dan Ali Wardhana cs, adalah bukti investasi AS dalam bentuk SDM Indonesia terdidik yang sudah

mengembalikan ‘hasil’ kepada negeri itu melalui banyak akses ekonomi dan politik. Keberhasilan AS inilah yang kemudian disinyalir diikuti oleh AUSAID (Australia), Monbusho (Jepang), Chevening (Inggris), DAAD (Jerman), STuned (Belanda), dan masih banyak lagi.

Efek dari berbagai strategi hegemoni keilmuan ini dapat kita lacak misalnya dalam kurikulum pengajaran ilmu sosial di pendidikan tinggi; betapa teori-teori Amerika yang positivistik (teori sistem, teori modernisasi, teori perilaku politik, teori perbandingan politik) telah, sedang, dan masih menjadi *mainstream* hingga kini.

Refleksi Konseptual: Dari Orientalisme menuju Poskolonialisme—Upaya Memahami “Objektifikasi Indonesia” dan Efeknya Kini

Hidup kita adalah kutipan dari hidup orang Barat; suara kita adalah kumandang Eropa; kita ini yang seharusnya seorang intelek tidak boleh lebih daripada sebuah tas penuh keterangan-keterangan; dalam jiwa kita ada kekosongan, hingga kita tidak sanggup untuk meresapkan apa-apa yang indah dan bernilai. —Ki Hajar Dewantara dalam Nugroho, 2007: 4

Apabila seseorang memiliki, mengerti, dan mengetahui yang lain, ia tidak akan menjadi yang lain. Kepemilikan, pengetahuan, dan pengertian adalah sinonim dari kekuasaan —Levinas, 1989 dalam Philpott, 2003: 17

Untuk memulai ulasan, peneliti akan menyitir tulisan pengantar Majalah

Tegal Boto (2003: 6) yang bernas menyangkut relasi Timur dan Barat. Perdebatan relasi di antara dua kutub tersebut akan digunakan sebagai *frame analysis* untuk melihat relasi keilmuan Indonesia (mewakili Timur) dan Amerika (mewakili Barat). Abad ini adalah abadnya peradaban Barat; sosok yang mengklaim diri sebagai representasi atas kemajuan. Dengan slogan “peradaban, pemberadaban”, Barat melancarkan seabrek proyek ambisius berbungkus “humanitas”. Di antaranya yakni rasionalisme, modernisme, sekularisme, demokrasi, dan “-isme-isme” yang lain. Tak hanya itu, sebagai jalan kemudian ilmu pengetahuan dicetak, narasi-narasi besar filsafat dibentuk, otoritas atas teks diperkukuh keberadaannya, sehingga lahirlah kemudian superioritas. Barat sebagai Sang Superior, memegang otoritas makna dan kuasa wacana. Para pengkaji poststrukturalisme percaya, dunia ini bukan hanya galaksi teks namun juga wacana, yang berjaln kelindan dengan kekuasaan. Sebuah kekuasaan yang tidak bisa semata-mata direduksi dalam konteks politik, ekonomi, control ideology, dan sosial yang dikaitkan begitu saja dengan apa yang dinamakan proses “pemaknaan, kemaknaan”. Di sinilah *power is practiced* dengan mediasi wacana. Foucault adalah guru mumpuni masalah wacana. Ia memandang pusat aktivitas manusia adalah wacana, yang terbentang sebagai lautan makna yang luas dan bukan *common text* yang universal. Meniru sang mentor, Nietzsche, Foucault menyatakan bahwa pengetahuan melahirkan kekuasaan

dan sebaliknya kekuasaan juga melahirkan pengetahuan. Adorno, tokoh paradigm kritis, menimpali, “*the demand for intellectual honesty is its dishonest*”. Dengan begitu, apa yang benar dan salahpun tergantung citra otoritas kekuasaan intelektual, politis, dan ideology saat itu.

Tepat pada poin tersebut, orientalisme¹⁰ muncul sebagai ilmu yang dituding menjadi juru bicara dan kepanjangan kolonialisme –imperialisme Eropa. Masih menyitir Tegaloboto (*Ibid.*), redaktur dengan jernih mengupas, setidaknya orientalisme telah memfungsikan diri sebagai alat hegemoni dalam bungkus-bungkus keilmiah dan objektivitas ilmu. Orientalisme memainkan peran sebagai distributor “realitas-realitas” etis, estetis, ekonomi, politik, sejarah, budaya, sosial, dan tentunya ideologis untuk kepentingan Barat. Hingga Barat dengan segala klaim superioritasnya menempati posisi epistemologis sebagai pemberadab, penyelamat, penyempurna Liyan mereka, Timur. Dengan logika oposisi biner, Barat memaksakan relasinya dengan Timur dalam wajah superior-inferior, pusat-pinggiran, ndominan-sub-ordinat. Disinilah orientalisme perlu dikritik keras telah menjebakkan diri dalam yang “*real*” dan “*imagined*” tentang Timur.

Namun demikian, setiap kekuasaan melahirkan perlawanan. Munculah poskolonialisme, ilmu yang menurut

¹⁰ Dalam kasus Indonesia, orientalisme mewujud dalam bentuk indologi (era kolonial) dan studi Indonesia atau *Indonesian studies* (pada era pasca PD II).

Jyotsna G. Singh (*Ibid.*) menentang sejarah “universal” kaum humanis liberal, “.. *poskolonial studies is a counter-diciplinary practice, analyzing literary texts, among other cultural forms, at the level of specific historical and discursive struggles by which they are shaped.*” Poskolonialisme menjadi ilmu yang membongkar segala narasi yang menjadi embrio jahat imperialism dan kolonialisme Barat. Seperti Said, Bhaba, Spivak, Ahmad, Jyotsna *cum suis* banyak membedah ide-ide kolonialisme yang terkandung dalam teks-teks sastra, ilmu pengetahuan. Perlu dipahami kolonialisme tidaklah berakhir (begitu saja) dengan berakhirnya pendudukan kolonial. Jadi, gagasan tentang “dampak kolonial” memiliki makna ganda: yang inklusif baik mengenai peristiwa historis dari pertemuan kolonial maupun perpisahannya. Ada gejala-gejala merugikan “masa lalu kolonial” dan “masa kini poskolonial” (Gandhi, 2001: 24). Bagi Simon During, poskolonialisme itu “*regarded as the need, in nations or groups which had been victims of imperialism, to achieve an identity uncontaminated by universalist or Eurocentric concept and images.*” During menegaskan lagi kehendak poskolonialisme itu tidak lebih kehendak atas identitas yang begitu penting bagi *decolonized communities* (*Ibid.*). Ironisnya harus kita sadar-akui bahwa kesadaran subyek poskolonial itu, layaknya imaji identitas; karena rekonstruksi sejarah dan penemuan identitas kolonial itu tidak lebih cetakan dari lensa mata Barat. Lahirlah elit-elit pribumi sebagai makelar identitas

berbanding lurus kesadaran negeri kolonial. Ilmuwan jelas masuk salah satu diantara yang determinan; walaupun bukan berarti tidak ada sama-sekali semacam *counter-culture*. Yang berkembang kemudian fenomena hibridasi, yakni menurut Pratt (*Ibid.*), semacam transkulturasi, dimana kelompok marginal atau subordinat itu membentuk dan memilih sebuah bentuk budaya baru yang materinya diambil dari budaya dominan.

Meskipun sangat keras melakukan kritik, penulis mengambil posisi bahwa, poskolonial tidak dimaksudkan untuk memperuncing sentimen yang berujung “anti Barat”. Sepakat dengan poskolonialis Hommi Bhabha, pendekatan ini nuasanya lebih condong *self critic* dan *therapeutic*. Bukan *apologetic*. Indonesia sebagaimana Timur yang mengalami objektivikasi dengan ragam moda secara terus-menerus nyaris tanpa jeda –*ad invinitum*, di bongkar untuk kemudian dibangun kembali; direkonstruksi secara mandiri.

Membongkar Epistemologi Barat dan Kepentingan di Balikinya

Satu poin vital yang ingin disampaikan oleh poskolonial adalah bahwa narasi sejarah pada dasarnya hanyalah konstruksional. Ia dibentuk, diproduksi, dan direproduksi terus-menerus oleh penguasa bahkan juga objek kuasa yang terjebak dalam wacana yang meng-objektivikasi dirinya. Lionell Gossmann (dalam Majalah Tegalboto, 2003: 10) bahkan menyebutkan narasi sejarah tak lebih dari narasi fiksional

yang seringkali enggan diakui oleh para sejarawan. Makna yang terkandung di dalamnya lebih merupakan efek dari rancangan naratif ketimbang deduksi fakta-fakta (Shelley Wafia, *Ibid.*). Dalam simulacra sejarah inilah, makna dimanipulasi, *dipreteli*, dipalsukan, dan dilebih-lebihkan dari realitas. Simulakra oleh Gilles Deleuze dijelaskan sebagai tanda atau symbol yang dibangun bukan oleh keserupaan atau kesamaan, tetapi ketidaksamaan, penyimpangan, atau perversi dari bentuk asli atau dari realitas. Bagi Jean Baudrillard, simulacra adalah mesin yang memproduksi segala hal yang palsu menyimpang dari rujukan dengan menciptakan tanda dan makna sebagai topeng, tabir, kamuflase, atau fatamorgana. Seperti disebutkan oleh Yasraf Amir Piliang, kekuatan simbol lebih dikerahkan dalam rangka membangun citra, membentuk opini public, mengubah persepsi, mengendalikan kesadaran massa, sembari mengarahkan ke dalam preferensi-preferensi meski segalanya tak lebih dari iring-iringan simulacra belaka. (*Ibid.*: 10-11)

Barat sadar betul bahwa kekuasaan tanpa pengetahuan tak ada apa-apanya. Maka diciptalah berbagai instrument-instrumen baik itu narasi sejarah, teori, metode, aliran pemikiran, dll, yang sanggup memelihara dan melanggengkan kekuasaannya. Cek misalnya tulisan Alan J. Bishop, *Western mathematics: The Secret Weapon of Cultural Imperialism* [dalam Ashcroft, Griffiths, et al (ed), 2001], yang mempersoalkan Matematika

Barat. Baginya, metode matematika Eropa akan bergesekan dan berdampak besar pada budaya pribumi. Matematika yang digunakan secara langsung dalam pengaplikasian berbagai konsep dan teknik, atau secara tak langsung melalui ilmu objektivikasi yang dijadikan nilai inti, matematika Barat. Demikian pun dengan bahasa. Melalui media perdagangan, administrasi, dan edukasi, simbolisasi dan struktur bahasa Barat, ini dipaksakan pada budaya pribumi. Akibatnya kita pun nyaris tak mengenal lagi, administrasi pemerintahan tradisional *ala leluhur*, seperti pemerintahan nagari di Sumatera Barat. (Majalah tegalboto, *Ibid.*: 11)

Dalam waktu yang sama, kekuasaan dikonstruksikan dan mendominasi untuk mengetahui. Jadi seperti kata Foucault, pengetahuan melahirkan kekuasaan, yang selanjutnya tak mungkin dilaksanakan tanpa adanya pengetahuan. Penerapan kekuasaan dan pengetahuan itu melahirkan wacana yang menciptakan keyakinan dan menentukan segala yang dianggap 'alami' dan 'normal'; dan tetap tegak dalam pilar bangunan 'keilmiahannya', yang direproduksi oleh Barat (*Ibid.*: 11). Sebagai akibat kemudian, terjajah menjadi korban epistemology kolonial. Budaya koloni tidak memiliki sedikitpun ruang untuk merepresentasikan dirinya. Budayanya hanya menjadi budaya pinggiran, tak berkelas, dan dianggap tak beradab. Apa yang memungkinkan kontinuitas kekuasaan Barat tak lain disebabkan oleh adanya konstruksi wacana-wacana yang

dioperasikan melalui logika –mengikuti istilah Ferdinand de Saussure–*oposisi biner*. Yakni, ketika makna muncul sebagai hasil dari keterkaitan antara proses kesamaan dan perbedaan. Makna dibuat dengan membagi dua dalam beberapa kategori yang saling tergantung: budaya/alam, laki-laki/perempuan, hitam/putih, baik/buruk, kita/mereka, Barat/Timur. Karena konstruksi logika biner ini diciptakan oleh Barat sendiri, tak pelak, stereotype buruk ditujukan bagi Bangsa Non-Barat. Semisal, jika rakyat terjajah itu irasional, maka Orang-Orang Eropa itu rasional.¹¹ *Alhasil*, ketika sistem ini masuk dalam kamar-kamar sosial, maka ia membentuk dualitas masyarakat yang saling menindas. Begitulah kolonialisme, perlu dipahami, tak hanya menjadi wahana bagi pengembangan teknologi-teknologi Barat, tetapi juga berarti usaha “pendayagunaan” gagasan, ide, kepentingan Barat ke negara-negara Non Barat demi memenuhi mesin-mesin hasrat kekuasaannya.

Post Scriptum: Dekolonisasi (Metodologi) dan Upaya Menuju Ilmu Sosial yang Kontekstual

Kini Barat sepakat dengan kami, bahwa ada banyak jalan menuju kebenaran, selain jalan Aristotelian, logika Thomistis, atau dialektika Hegelian. Tetapi, ilmu-ilmu sosial dan humaniora itu sendiri haruslah didekolonisasi

¹¹ Perumpamaan yang lain, jika yang pertama tidak beradab, sensual, dan malas, maka Eropa adalah peradaban itu sendiri, dengan nafsu seksual yang terkendalidan etik dominannya adalah kerja keras. Dan jika, Timur itu sttatis, Eropa dilihat berkembang dan selalu progresif. Atau Timur itu feminine, sedangkan Barat maskulin. *Ibid.*, hlm 14

(terlebih dahulu –pen) –Engelbert
Mveng dalam Wallerstein (1997: 86)

Dengan meleburkan rasa dan emosinya dalam kertas kerja yang ia buat, poskolonialis Smith menulis (2005: xv): cara-cara penelitian ilmiah yang dilakukan para peneliti dan intelektual barat merupakan penyumbang dampak negative kolonialisme, menciptakan sejarah, serta realitas yang mengubur eksistensi *other*. Para peneliti dan intelektual Barat berasumsi mengetahui segala hal tentang bangsa terjajah hanya dari perjumpaan sesaat dengan salah seorang bangsa terjajah. Dan yang membuat tersengat lagi, tukas Smith, Barat mengklaim kepemilikan cara-cara bangsa terjajah dalam mengetahui tamsil bangsanya, lalu pada saat bersamaan menampik orang-orang yang menciptakan dan mengembangkan gagasan-gagasannya, bahkan mengetahui bahwa itu adalah miliknya. Lebih dari itu, Barat menolak kemungkinan bangsa terjajah bisa menciptakan budaya dan *nation* sendiri. Praktik-praktik yang berhubungan dengan abad silam –bahkan abad-abad sebelumnya– tetap dipergunakan untuk menyangkal validitas klaim bangsa terjajah atas eksistensi, tanah, wilayah, maupun hak menentukan nasib sendiri (*self-determination*), melestarikan bahasa dan berbagai bentuk pengetahuan cultural, kekayaan alam, dan system kehidupan dalam lingkungan bangsa terjajah.

Cara pandang imperialism tersebut diabadikan melalui infiltrasi pengetahuan: menghimpun penduduk bangsa terjajah, mengklasifikasikan, dan merepresentasikan

dengan segala macam cara Barat, lalu lewat kaca mata Barat dikembalikan lagi kepada Bangsa terjajah. Edward Said menyebut proses ini sebagai wacana barat tentang ‘yang Lain’ (*Other*), yang didukung oleh institusi, penghargaan akademik, kosa kata, perumpamaan, doktrin bahkan juga birokrasi kolonial dan gaya kolonial. Menurut Said proses ini berlangsung antara lain disebabkan oleh pertukaran timbal balik yang simultan antara konstruksi sekolahan (*scholarly construction*) dan konstruksi imajinatif terhadap ide-ide tentang Timur (*Orient*). Konstruksi sekolahan di mata Said, ditopang oleh sebuah institusi korporasi yang mengeluarkan pernyataan tentang Timur dengan mengotori berbagai pandangan dan mendeskripsikannya lewat ajaran untuk menetapkan dan menguasai. (Smith, 2005: xvi-xvii)

Dekolonisasi hadir sebagai kebutuhan dunia keilmuan Bangsa Koloni untuk melakukan dekonstruksi keserjanaan Barat; lebih jauh lagi untuk “memerdekakan diri”. Dalam bukunya yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, *Dekolonisasi Metodologi*, Smith (2005: 10) dengan antusias berujar, bahwa penggarapan ulang terus-menerus dampak imperialism dan kolonialisme merupakan aspek penting politik cultural bangsa terjajah yang akhirnya membentuk basis bahasa kritik.¹² Smith menandakan,

¹² Dalam kritik ini ada dua aliran besar. Yang pertama berpegang pada gagasan tentang otentisitas, waktu di mana bangsa terjajah masih utuh. Saat itu bangsa terjajah mempunyai otoritas absolute atas kehidupannya; mereka lahir dan besar dalam semesta yang sepenuhnya diciptakan

sejarah yang diceritakan dari perspektif penjajah perlu diurai kembali.¹³ Sejarah merupakan aspek vital dari dekolonisasi; sebab dari sanalah kesadaran atas (pos) kolonialitas bermula. Sejarah adalah arena perebutan makna dan kuasa; karenanya diperlukan perebutan sejarah. Inilah proyek dekolonisasi yang dimaksudkan; sebuah proyek rekonstruksi sejarah. Dengan demikian, realitas objektif diyakini ke-naif-annya. Meminjam bahasa Purwo Santoso (2011), sejarah tidak dibiarkan bicara “apa adanya”, namun disadari “ada apa-apanya”.

Jika kita kaitkan dengan pemikiran orientalisme-nya Said, salah satu poin terpentingnya adalah kekuasaan tidak bersifat univocal dan tidak hanya mewujudkan sebagai pembatasan dan pemaksaan. Philpott (2003: 22) mengutip Said, “Inti pendapat saya adalah bahwa kita bisa memahami secara lebih baik kekuatan dan

sendiri. Adapun aliran yang kedua, bahasa kritik yang menegaskan bahwa mereka memiliki analisis, kenapa mereka bisa dijajah, apa makna dari hal itu terkait dengan masa lalu mereka dan apa pula makna bagi masa kini dan masa depan mereka. Kedua aliran tersebut saling beririsan, namun yang paling signifikan dalam wacana bangsa terjajah adalah solusi yang diajukan itu merupakan kombinasi dari masa sebelumnya, *jaman penjajahan*, dan masa sebelum itu, *jaman pra penjajahan*. Dekolonisasi merangkum kedua gagasan tersebut.

¹³ Smith coba mengikhtisarkan bagaimana sejarah berkumpul di sekitar rangkaian ide: 1) ide bahwa sejarah adalah wacana totalitas; 2) ide tentang adanya suatu sejarah universal; 3) ide bahwa sejarah adalah sebuah kronologi besar; 4) ide bahwa sejarah adalah soal perkembangan; 5) ide bahwa sejarah adalah tentang subyek manusia yang mengaktualisasikan diri; 6) ide bahwa sejarah dapat dituturkan dalam satu narasi koheren; 7) ide bahwa sebagai sebuah disiplin sejarah itu polos; 8) ide bahwa sejarah dikonstruksikan di seputar kategori biner; 9) ide bahwa sejarah itu patriarkal. (Simth, 2005: 20-24)

daya tahan berbagai sistem hegemonik, seperti budaya, ketika kita menyadari bahwa pemaksaan internal mereka atas para penulis dan pemikir bersifat produktif, tidak secara sepihak menghambat”. Di sanalah ruang untuk melakukan pembongkaran terletak. Sebuah kajian yang bertahan menjadi pengetahuan dan kemudian dianggap sebagai suatu ‘kebenaran’, sebetulnya semata merupakan efek dari sebuah praktik diskursif; konstruksi sosial; yang tanpa sadar terus kita produksi dan reproduksi tanpa jeda (Philpott, 2000: v-vi). Teks lantas bukan hanya soal menginformasikan (*to inform*), melukiskan (*to describe*), menjelaskan (*to explain*), dan menyampaikan (*to deliver*), tapi juga mencipta (*to invent*). Teks memberi batasan pengertian dan kemudian berhilir pada pertimbangan bagi formasi kekuasaan. Pun bukanlah titik akhir apalagi suatu kemestian dalam lintasan sejarah. Inilah perlunya membaca ulang (secara kritis), guna meruntuhkan kebenaran yang dianggap final tersebut, untuk kemudian memunculkan kebenaran baru versi subjek yang selama ini diobjektifikasi. Dalam bahasa Foucault, ini adalah bagian dari upaya teknologi diri (teknik-teknik penguasaan diri/*techniques of the self*). Yaitu upaya subyek untuk mengaktivasi dirinya.¹⁴

¹⁴ Dekolonisasi metodologi sendiri bagi peneliti lebih merupakan sebuah pendekatan serupa dengan poskolonialisme hanya saja lebih menitik focus ke masalah ontology dan epistemologi ilmu, ketimbang satu instrumen metodologis yang operasional.

Kontekstualisasi Ilmu

Pada titik ini, setelah dekolonisasi metodologi diinisiasi-kembangkan lebih lanjut, agenda selanjutnya adalah upaya indigenisasi ilmu sosial. Semacam upaya pengembangan sistem nilai dan pengetahuan lokal untuk dijadikan alternatif paradigma ilmu sosial yang lebih kontekstual. Baik sifatnya bagian dari genealogi pengetahuan berbasis lokal yang hendak diilmiahkan; sekaligus, indigenisasi sebagai bagian dari kontekstualisasi ilmu-ilmu sosial yang berkembang kini dalam berhadapan dengan material dan semantik lokal.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 1979. *The Social Sciences in Indonesia: Performance and Perspectives*.
- Alatas, Syed Farid, 2010. *Diskursus Alternatif dalam Ilmu Sosial Asia: Tanggapan terhadap Eurosentrisme*. Bandung: Mizan Publika.
- Alfian, 1979 (a). *Political Science in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- _____, dan Mukmin, Hidayat (ed), 1985. *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia serta Peranannya dalam Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Rajawali-AIPI.
- Arndt, HW (ed), 1987. *Pembangunan dan Pemerataan: Indonesia di Masa Orde Baru*. Jakarta: LP3ES.
- Ashcroft, Griffiths, et all (ed), 2001. *The Post Colonial Studies Reader*. London and New York: Routledge.
- Budiarjo, Miriam dan Rauf, Maswardi, 1983. *Perkembangan Ilmu Politik di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dhakidae, Daniel, 2003. *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Foucault, Michel, 1980. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. Edited by Colin Gordon. New York: Pantheon Books.
- Gandhi, Leela, 2001. *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*. Yogyakarta: Qalam.
- Hadi, Shaummil. 2008. *Third debate dan Kritik Positivisme Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hartoko, Dick, 1981. *Golongan cendekiawan, Mereka yang Berumah di Angin: Sebuah Bunga*

- Rampai*. Jakarta: Gramedia.
- Hasan, Fuad, 2001. *Studium Generale*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Kleden, Ignas, 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Latif, Yudi, 2005. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi intelegensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: Mizan.
- Malo, Manasse (ed), 1989. *Pengembangan Ilmu Sosial di Indonesia Sampai Dekade' 80an*. Jakarta: Rajawali Press – PAU Ilmu-Ilmu Sosial UI.
- Philpott, Simon, 2003. *Meruntuhkan Indonesia: Politik Postkolonial dan Otoritarianisme*. Yogyakarta: LKIS.
- Purwanto, Bambang dan Adam, Asvi Warman, 2005. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Rais, Mohammad Amien, 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!* Yogyakarta: PPSK Press.
- Said, Edward, 1978. *Orientalism*. New York: Norton.
- Schroft, Bill A, at All (eds), 2001. *The Post Colonial Studies Reader*. London and New York: Routledge.
- Smith, Linda Tuhiwai, 2005. *Dekolonisasi Metodologi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Zarkasyi, Hamid Fahmy, 2012. *Misykat: Refleksi tentang Islam, Westernisasi, dan Liberalisasi*. Jakarta: INSISTS.
- Jurnal**
- Islamia, Vol III. No. 2. *Melacak Akar Peradaban Barat*. Jakarta: INSIST
- Jurnal Ilmu Politik, 1986. Edisi 1. Jakarta: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) dengan Gramedia.
- Majalah Tegalboto, 2003. *Kritik Relasi Timur-Barat. Edisi Khusus*. Jember: Unit Kegiatan Pers Kampus Mahasiswa Universitas Jember (UneJ). November, 2003.
- Majalah Tempo, 2011. Liputan Khusus. *Republik di Mata Indonesianis: Pasang Surut Peran Peneliti Asing dalam Sejarah Indonesia*. Edisi 14-20 November.
- Dokumen/Artikel/Naskah Akademik**
- Budiardjo, Miriam, 1989. *Perkembangan Ilmu Politik*. Makalah disampaikan pada upacara “Memasuki Masa Purnabakti di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik”, Universitas Indonesia, 1 April 1989.
- Gaffar, Afan, 2001. *Dari Negara ke Negara Perubahan Paradigma dalam Ilmu Politik*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
- Nugroho, Angga (a). *Politik Basiswa Australia*.
- Priyahita, Widya, 2012. *Apolitical Politics: Kajian Ilmu dan Kekuasaan di Indonesia*. Skripsi Jurusan Politik dan Pemerintahan, UGM, Yogyakarta.
- Santoso, Purwo, 2011. *Ilmu Sosial Transformatif*. Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar pada FISIPOL, Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.